

Arah Kebijakan Otoritas Moneter Indonesia Tahun 2008

Oleh : Marsuki

*Disampaikan dalam **Seminar Perbankan Nasional**
STIEM Bongaya
Dengan Tema : Arah Kebijakan Perbankan Nasional,
Pasca Kenaikan Harga BBM.*

Hotel Quality Makassar, 2 Agustus 2008

Arah Kebijakan Otoritas Moneter Indonesia Tahun 2008¹

Oleh : Marsuki²

Menarik untuk menyimak dampak beberapa kejadian ekonomi besar beberapa waktu terakhir ini, terutama terhadap rencana dan pelaksanaan kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh BI hingga akhir tahun 2008 ini.

Faktanya, beberapa bulan setelah pidato terakhir masa jabatan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, begitu banyak peristiwa yang dialami BI yang cukup memprihatinkan. Seperti tersandungnya Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dalam kasus hukum, sehingga terpilihnya Gubernur BI yang baru yang sangat alot, Prof. Budiono, serta adanya gejolak perekonomian dunia, pada awal triwulan II 2008, akibat volatilitas harga komoditas minyak dunia sehingga memaksa pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, serta adanya krisis pangan dunia yang sulit diprediksi. Kesemuanya itu kemudian berimplikasi pada menurunnya produktivitas perekonomian nasional. Berikut akan coba ditelaah secara singkat tentang arah kebijakan otoritas moneter Indonesia hingga berakhirnya periode tahun 2008 ini.

Hingga kini, tampaknya Gubernur BI baru belum memberi sinyal pasti tentang arah kebijakan moneter yang akan ditempuhnya. Mungkin karena masih mengamati atau mempelajari kondisi-kondisi yang ada, baik mengenai perihal manajemen internal BI, maupun rancangan kebijakan moneter yang sudah ada, atau mungkin menyangkut kondisi perkembangan perekonomian global yang masih sulit diprediksi. Tentu

¹ Disampaikan dalam **Seminar Perbankan Nasional STIEM Bongaya**, dengan Tema : *Arah Kebijakan Perbankan Nasional, Pasca Kenaikan Harga BBM. Hotel Quality Makassar, 2 Agustus 2008*

² Dosen Fakultas Ekonomi - PPS Unhas dan PPS STIEM Bongaya, Makassar.

saja hal ini wajar dilakukan Gubernur BI baru, agar supaya tidak terjebak dalam lingkaran masalah BI yang sudah ada dan kondisi perekonomian global yang terus berubah.

Meski demikian, dengan mengikuti sekilas perkembangan strategi kebijakan moneter yang ditempuh Gubernur BI baru dalam waktu terakhir ini, tampaknya referensinya mengacu pada rancangan Gubernur BI sebelumnya, dengan melakukan beberapa penyesuaian praktis, namun dengan sasaran tetap pada upaya menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah dan kondusifnya kegiatan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Sebelum menerangkan arah kebijakan BI yang direncanakan ditempuh, maka terlebih dulu dijelaskan mengenai beberapa tantangan yang sedang dan akan dihadapi serta kondisi kekuatan struktural perekonomian nasional periode sebelumnya.

Tantangan pertama, adanya perubahan-perubahan di pasar keuangan global, sebagai akibat perkembangan pesat teknologi informasi, adanya inovasi instrumen dan munculnya pemain baru dalam pasar keuangan global. Kemudian, adanya perubahan di pasar barang dunia atas jumlah dan harga komoditas energi, pangan maupun persoalan pemanasan global. Selanjutnya adanya tantangan eksklusi sosial ekonomi yang ditunjukkan adanya disparitas tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Termasuk adanya tantangan persistensi perkembangan inflasi, akibat kenaikan harga sebab inefisiensi proses produksi dan distribusi, serta adanya high cost economy akibat perilaku rent seeking kelompok penguasa baru di daerah otonom. Serta adanya tantangan lemahnya daya saing daerah, sebagai akibat kepentingan politik praktis Pemda yang tidak pro kegiatan produktif masyarakat, kurangnya fasilitas infrastruktur, serta rendahnya kualitas SDM.

Walau demikian, kondisi perekonomian nasional secara umum selama tahun 2007, dapat dikatakan dalam kondisi optimistik dibanding periode 2006. Hal ini dianggap karena semakin efektifnya pemerintah melaksanakan fungsi birokrasinya. Sehingga berimplikasi pada membaiknya kondisi kegiatan sektor riil (investasi), tercermin dari rasio

investasi terhadap PDB meningkat secara signifikan. Demikian juga kinerja sektor-sektor ekonomi potensial, termasuk manufaktur, namun terutama sektor ekstraktif, perdagangan, telekomunikasi, transportasi, utilitas, dan jasa-jasa.

Demikian juga dari sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terus mengalami posisi surplus, mencapai 3,1% dari PDB. Kondisi ini didukung adanya net aliran modal portofolio ke pasar keuangan domestik, penanaman modal langsung, net ekspor maupun net jasa remitansi tenaga kerja migran Indonesia. Menariknya, ekspor non migas tetap tinggi ditengah perekonomian global yang melambat. Hasilnya, nilai cadangan devisa negara terus meningkat secara signifikan, mencapai USD 56,9 miliar. Semua pengaruh aspek riil tersebut kemudian berdampak pada membaiknya kondisi pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 6,3% pertahun.

Dari sisi stabilitas mata uang Rupiah telah menunjukkan pula kondisi inflasi IHK yang perubahannya cukup stabil dengan posisi inflasi rendah. Termasuk volatilitas nilai Rupiah terhadap mata uang asing yang sesuai target, tercermin dari posisi nilai tukar yang stabil dan rasional dalam kisaran Rp. 9100- Rp. 9200 per USD. Demikian pula di bidang perbankan, indikator-indikator perbankan menunjukkan kondisi yang mengembirakan, jika dilihat dari sisi nilai dan pertumbuhan asset (Rp 1.895 triliun), kredit (Rp. 1.004,6 triliun), DPK (Rp. 1.437,5 triliun), NPL net (2,3%), CAR (19,5%), dan profit perbankan, ROA (2,8%).

Berdasarkan berbagai tantangan dan kondisi kondusifnya perekonomian nasional tersebut maka BI telah membuat rancangan pendekatan atau mekanisme kebijakan moneter yang akan ditempuh guna menyikapi, mengatasi maupun menjawab berbagai hal yang ada, melalui empat kelompok inisiatif besar, sesuai dengan peran dan fungsi yang harus diembannya, berupa inisiatif di bidang moneter, di bidang perbankan, di bidang sistem pembayaran dan di bidang pemberdayaan sektor riil.

Pertama, inisiatif di bidang moneter terutama dimaksudkan untuk menjawab tantangan globalisasi sektor keuangan, meliputi tiga inisiatif, yakni pengembangan pasar keuangan domestik, melalui kegiatan manajemen likuiditas dan mempercepat pengembangan industri keuangan syariah beserta instrumen-instrumennya; penguatan efektifitas kebijakan moneter dalam rangka kebijakan Inflasi (ITF), melalui mekanisme fine tuning operations dengan pengaturan suku bunga (BI rate, dan pasar uang); dan penguatan perangkat analisa kebijakan menuju MEA 2015 dalam rangka integrasi perekonomian nasional dalam perekonomian global ASEAN .

Kedua, dalam kaitan dengan inisiatif di bidang perbankan, BI akan melakukan tiga kebijakan mendasar. Meliputi, melanjutkan proses penataan kembali struktur industri perbankan nasional API, kemudian mengembangkan industri BPR sebagai salah satu penopang perekonomian lokal dengan pola operasinya yang bersifat customized dalam rangka aksesibilitas masyarakat kecil pada sektor keuangan formal. Serta BI berupaya mempercepat pertumbuhan perbankan syariah.

Ketiga, dalam kaitan dengan inisiatif di bidang Sistem Pembayaran Nasional, guna mendukung stabilitas sistem keuangan, BI membuat sistem pembayaran nasional semakin bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan praktek-praktek internasional, melalui penerapan Sistem Bank Indonesia Government-Electronic Banking (BIG-eB) dan meluncurkan BI-RTGS versi 2.0, serta pengekstifan pengedaran uang ke seluruh pelosok negeri.

Keempat, dalam kaitan inisiatif di bidang pemberdayaan sektor riil, BI akan melakukan beberapa kegiatan mendasar, dengan membenahi peran BI sebagai policy advisory, diantaranya memperbaiki cakupan dan kualitas data statistik perekonomian daerah di KBI dan melakukan integrasi pelaporan statistik perekonomian dengan lembaga-lembaga berkompeten di daerah.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kerangka mekanisme kebijakan moneter yang akan ditempuh BI tahun 2008, telah diperkaya dengan

pemikiran dan strateginya. Yang ditunggu, dampak dari berbagai rencana kebijakan tersebut. Semoga berjalan sesuai rencana, sebab perlu disadari banyaknya kejadian dalam waktu terakhir ini yang terus yang sulit diprediksi yang dapat mempengaruhi efektifitas kebijakan moneter BI. Oleh karena itu Gubernur BI yang baru perlu berhati-hati namun dapat bertindak pragmatis menghadapi masalah kontemporer yang terus berkembang secara proporsional.